

**FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI PENCEGAHAN *FRAUD*
PENGELOLAAN DANA DESA
DI KECAMATAN MRANGGEN DAN KARANGAWEN**



MANUSKRIP

Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Semarang

Disusun Oleh

SERENA DANIES DAMAYANTI

NIM. E2B018311

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SEMARANG**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Serena Danies Damayanti
Nomor Induk Mahasiswa : E2B018311
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis/ S1 Akuntansi
Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan
Fraud Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan
Mranggen dan Karangawen

Telah memenuhi syarat dan dinyatakan lengkap sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Semarang.

Semarang, 23 Mei 2025

Dosen Pembimbing I



(Dr. Fatmasari Sukesti, SE., M.Si.)

NIDN : 0622056603

Dosen Pembimbing II



(Nur Khatik, SE., M.Si.)

NIDN : 0614076902

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



(Dr. Fatmasari Sukesti, SE., M.Si.)

NIDN: 0622056603

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN MRANGGEN DAN KARANGAWEN

Serena Danies Damayanti

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Semarang

Email:

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh pengendalian internal, kompetensi aparatur, *whistleblowing system*, dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Mranggen dan Karangawen. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik *purposive sampling*, melibatkan 118 responden yang terdiri dari perangkat desa di dua kecamatan, yakni Karangawen dan Mranggen. Data dikumpulkan melalui survei menggunakan angket dan dianalisis dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal dan kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, sementara *whistleblowing system* tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Penerapan prinsip-prinsip GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan uji koefisien determinasi, keempat variabel tersebut mampu menjelaskan 52,4% pengaruh terhadap pencegahan *fraud*, dengan 47,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah desa memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kompetensi aparatur, memperbaiki implementasi *whistleblowing system*, dan meningkatkan penerapan GCG untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah dan menambahkan variabel lain untuk memperkaya pemahaman mengenai pencegahan *fraud*.

Kata kunci: Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur, *Whistleblowing System*, *Good Corporate Governance*, Pencegahan *Fraud*

ABSTRACT

This study aims to analyze and prove the influence of internal control, apparatus competence, whistleblowing system, and the implementation of Good Corporate Governance (GCG) on fraud prevention in the management of village funds in Demak Regency. A quantitative approach was used with purposive sampling technique, involving 118 respondents consisting of village officials from two sub-districts, namely Karangawen and Mranggen. Data were collected through surveys using questionnaires and analyzed with multiple linear regression. The results showed that internal control and apparatus competence had a positive and significant impact on fraud prevention, while the whistleblowing system did not show a significant effect. The implementation of GCG principles had a positive and significant impact on fraud prevention. Based on the coefficient of determination test, the four variables explained 52.4% of the influence on fraud prevention, with the remaining 47.6% influenced by other factors. This study suggests that village governments strengthen the internal control system, improve apparatus competence, enhance the implementation of the whistleblowing system, and increase the application of GCG to prevent fraud in the management of village funds. Future researchers are expected to expand the scope of the study area and add other relevant variables to enrich the understanding of fraud prevention.

Keywords: Internal Control, Apparatus Competence, Whistleblowing System, Good Corporate Governance, Fraud Prevention

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah lama mengalokasikan dana untuk mendukung pembangunan desa melalui Dana Desa. Mengacu pada UU No. 6 Tahun 2014, Dana Desa berasal dari alokasi sebesar 10% APBN dan dikelola langsung oleh pemerintah desa guna mendukung program pembangunan yang efisien, efektif, dan tepat sasaran (Suandewi, 2021). Desa idealnya diberi wewenang luas dalam pengelolaan dana desa agar mampu mengembangkan potensi lokal dan menciptakan pemerataan pembangunan. Otonomi ini penting mengingat tiap desa memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah desa dapat merancang program pembangunan yang sesuai, mulai dari infrastruktur dasar hingga pelatihan dan penguatan ekonomi lokal. Tren peningkatan anggaran dana desa dari 2015 hingga 2024 mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa:



Gambar 1. Perkembangan Dana Desa TA 2022-2024

Tren peningkatan anggaran dana desa dari tahun ke tahun menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa yang sempat mencapai Rp72 triliun pada 2021, sempat turun menjadi Rp68 triliun di 2022, lalu kembali naik menjadi Rp70 triliun pada 2023, dan Rp71 triliun di tahun 2024, atau naik 1,42% dari tahun sebelumnya. Dana ini diprioritaskan untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting. Namun, seiring meningkatnya anggaran, potensi penyimpangan juga ikut naik. Tindakan kecurangan seperti korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan penyelewengan aset kerap melibatkan aparatur desa. Laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) pun mengungkap bahwa sektor pengelolaan dana desa termasuk dalam kategori yang rawan korupsi.



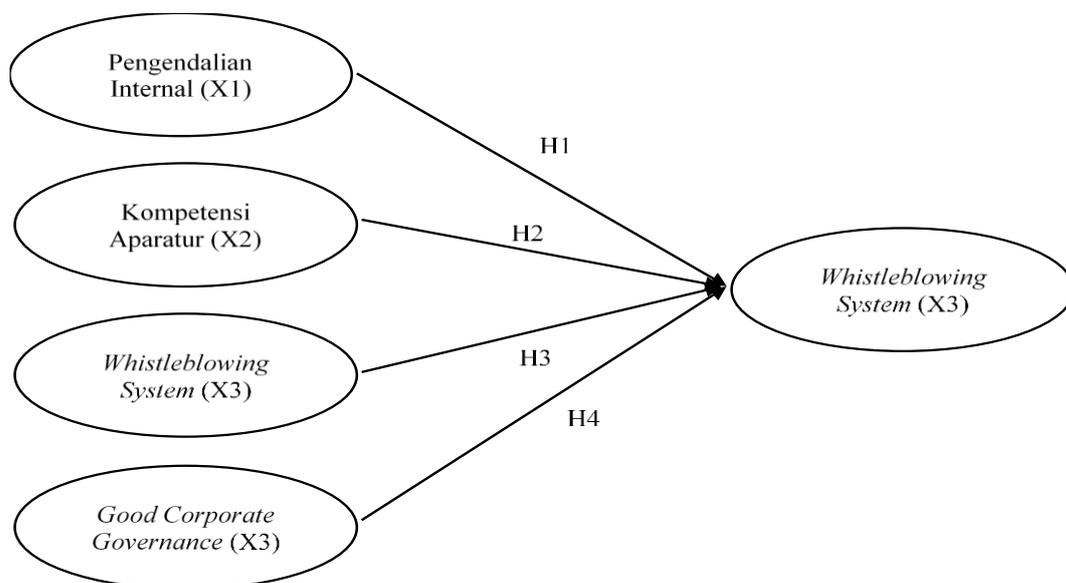
Gambar 2. Total Kasus Korupsi di Indonesia 2023

Menurut laporan Indonesian Corruption Watch (ICW), sektor pemerintahan desa mencatat jumlah kasus korupsi tertinggi pada tahun 2023, dengan total 187 kasus dan kerugian negara sekitar Rp162,2 miliar (Kompas.com, 2024). Salah satu kasus terjadi di Kabupaten Demak, melibatkan Kepala Desa Kuncir, Agus Triyono, yang terbukti menyelewengkan dana desa tahun anggaran 2021 dan 2022 sebesar Rp220 juta untuk kepentingan pribadi (Kompas.com, 2023). Kasus ini memperlihatkan lemahnya pengelolaan serta kurangnya kepatuhan terhadap prosedur, termasuk tidak adanya pelaksana kegiatan yang sah.

Pengendalian internal merupakan salah satu mekanisme penting untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Sistem ini bertujuan menjamin efisiensi operasional, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi (Akhyaar et al., 2022). Namun, efektivitas pengendalian internal masih diperdebatkan. Penelitian Kusumaningrum dan Wulandari (Kusumaningrum & Wulandari, 2023) menunjukkan pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan, sedangkan temuan Akhyaar et al., (2022) menunjukkan sebaliknya, akibat lemahnya otorisasi dan pembagian wewenang. Faktor kompetensi aparatur desa juga memiliki pengaruh yang beragam. Raharja dan Sulistyowati (2024) menyatakan bahwa kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Dewi et al., menemukan bahwa kompetensi aparatur berdampak positif pada pencegahan kecurangan, tetapi Mufidah dan Masnun (2021) menilai peningkatan kompetensi belum tentu efektif mencegah penipuan.

Dalam hal *whistleblowing system*, Suandewi (2021), menyebutnya sebagai alat deteksi dini terhadap indikasi kecurangan. Saida et al., (2023) mendukung efektivitasnya, namun Dewi et al., (2022) berpendapat bahwa pengawasan ketat pemerintah telah mengurangi relevansi sistem ini dalam mencegah korupsi dana desa. *Good Corporate Governance* (GCG) juga dinilai sebagai faktor penting dalam mencegah kecurangan. GCG meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas (Rahmadani & Sugiarto, 2023). Naufal (2023) menyatakan bahwa GCG sangat berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, namun Saida et al., (2023) mengungkapkan bahwa efektivitas implementasi GCG yang rendah menyebabkan prinsip tersebut belum dijalankan secara optimal.

Melihat adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya (*research gap*) dan perbedaan fenomena di lapangan (*phenomenon gap*), penelitian ini difokuskan untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Mranggen dan Karangawen. Penelitian berfokus pada empat variabel utama, yaitu pengendalian internal, kompetensi aparatur, sistem *whistleblowing*, dan penerapan GCG.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa.

Komite Organisasi Sponsor Komisi *Treadway* (COSO) mengartikan pengendalian internal menjadi suatu sistem yang meliputi kebijakan, prosedur, serta aktivitas yang dirancang untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi terkait efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan pada aturan yang berlaku. Dalam perspektif *Stewardship Theory*, aparatur pemerintah bertindak sebagai *steward* atau pengelola yang dapat dipercaya untuk bertindak demi kepentingan masyarakat. Sistem pengendalian internal berperan sebagai alat untuk mendukung peran *steward* ini, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel, serta mencegah penyimpangan seperti kecurangan.

Menurut Adhivinna et al., (Adhivinna et al., 2022) ditemukan bahwa pengendalian internal membantu mencegah kecurangan. Penelitian Saida et al., (Saida et al., 2023) juga mengemukakan hal serupa dimana pengendalian internal membantu mencegah kecurangan. Dengan mempertimbangkan uraian tersebut, berikut rumusan hipotesisnya:

H₁: Diduga Pengendalian Internal Memiliki Pengaruh Secara Positif Terhadap Pencegahan Kecurangan

Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa..

Kompetensi mencakup pengetahuan atau keahlian dari setiap orang terkait dengan tugas mereka di tempat kerja (Suandewi, 2021). Kompetensi dapat menentukan berhasil tidaknya suatu pemerintahan desa dalam mengelola dan mengalokasikan dana desa serta melakukan upaya pencegahan peluang terjadinya tindakan kecurangan. Dalam *stewardship theory*, para aparatur desa diasumsikan sebagai pengelola (*steward*) yang bertanggung jawab atas semua kepentingan organisasi dengan masyarakat sebagai pemilik yang saling mempercayai akan keberlangsungan organisasi suatu desa.

Penelitian Suandewi (Suandewi, 2021) mengemukakan bahwa kompetensi dari aparatur memiliki efek positif pada pencegahan penipuan. Penemuan ini sejalan dengan penelitian Dewi et al., (Dewi et al., 2022) yang juga menunjukkan bahwa kemampuan karyawan juga membantu mencegah kecurangan. Dengan mempertimbangkan uraian tersebut, berikut rumusan hipotesisnya :

H₂ : Diduga Kompetensi dari Aparatur Memiliki Pengaruh Secara Positif Pada Pencegahan Kecurangan

Pengaruh Sistem Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa.

Sistem *whistleblowing* memungkinkan *whistleblower* melaporkan kecurangan tanpa khawatir akan diketahui oleh pihak lain (Fathoni et al., 2024). Sistem *whistleblowing* sebagai *early warning system* yang memungkinkan seseorang untuk melaporkan tindakan menyimpang yang terdeteksi sejak dini sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan pada sebuah organisasi (Suandewi, 2021). Dalam perspektif *Stewardship Theory*, sistem *whistleblowing* menjadi salah satu bentuk kontrol sosial yang mendukung integritas dan tanggung jawab para *steward*. Dengan adanya sistem pelaporan yang efektif dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor, pelaku kecurangan akan berpikir ulang sebelum melakukan tindakan menyimpang.

Penelitian Akhyaar et al., (Akhyaar et al., 2022) menemukan bahwa sistem *whistleblowing* memiliki efek positif pada pencegahan kecurangan. Penemuan ini sesuai dengan temuan Saida et al., (Saida et al., 2023) yang juga menemukan bahwa sistem *whistleblowing* berkontribusi secara positif dalam mencegah kecurangan. Dengan mempertimbangkan uraian tersebut, berikut rumusan hipotesisnya:

H₃ : Diduga Sistem Whistleblowing Memiliki Pengaruh Secara Positif Pada Pencegahan Kecurangan

Pengaruh GCG Terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa..

Good Corporate Governance (GCG) mencakup sistem tata kelola organisasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengendalian internal (Rahmadani & Sugiarto, 2023). Dalam *Stewardship Theory*, organisasi diasumsikan dijalankan oleh individu yang bertanggung jawab (*steward*) untuk mengelola sumber daya dengan integritas demi kepentingan publik. Penerapan prinsip GCG sejalan dengan konsep *stewardship* karena menekankan nilai tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi.

Naufal (Naufal, 2023) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa GCG membantu mencegah penipuan. Penemuan ini sejalan dengan Destiyana et al., (Destiyana et al., 2024) yang juga menemukan bahwa GCG membantu mencegah kecurangan. Dengan mempertimbangkan uraian tersebut, berikut rumusan hipotesisnya :

H₄ : Diduga *Good Corporate Governance* Memiliki Pengaruh Secara Positif Terhadap Pencegahan Kecurangan

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini karena data yang dikumpulkan dalam bentuk angka yang kemudian di analisis secara statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis serta menggambarkan keterkaitan antarvariabel yang diteliti (Sugiyono, 2017). Populasi dari penelitian ini mencakup seluruh perangkat desa yang terlibat pada pengelolaan anggaran dana desa di wilayah Kecamatan Mranggen sebanyak 19 desa, sedangkan di Kecamatan Karangawen terdapat 12 desa, sehingga total desa yang menjadi cakupan populasi adalah 31 desa.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana teknik penentuan sampel ini berdasarkan pada suatu kriteria responden yang mencakup jabatan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, serta perangkat desa lainnya yang memiliki peran dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa.

Penelitian ini menganalisis data secara kuantitatif menggunakan metode numerik. Uji validitas, reliabilitas, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis koefisien determinasi, uji F, uji t, dan analisis regresi linear berganda adalah semua teknik analisis yang digunakan. Program aplikasi SPSS digunakan untuk memfasilitasi analisis hasil penelitian (Ghozali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Objek Penelitian

Penelitian ini melibatkan perangkat desa di wilayah Kecamatan Mranggen dan Karangawen yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana desa. Fokus penelitian pada dua kecamatan, yaitu Karangawen dan Mranggen, dengan total 31 desa yang terdiri dari 12 desa di Kecamatan Karangawen dan 19 desa di Kecamatan Mranggen. Perangkat desa yang menjadi objek dalam penelitian ini mencakup posisi strategis dalam tata kelola keuangan desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan staf pelaksana yang memiliki keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana desa.

Analisis Deskriptif

Jenis Kelamin Responden

Deskriptif jenis kelamin perangkat desa ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Deskriptif Jenis Kelamin Responden

		Frekuensi	Persentase
Valid	Pria	103	87.3
	Wanita	15	12.7
	Total	118	100.0

Sumber: Data primer diolah, 2025

Hasil distribusi dari 118 responden perangkat desa di Kecamatan Karangawen dan Mranggen menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki jenis kelamin pria berjumlah 103 orang (87,3%), sedangkan wanita berjumlah 15 orang atau 12,7%.

Usia Responden

Deskriptif usia perangkat desa dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Deskriptif Usia Responden

		F	Persentase
Valid	18-25 Tahun	1	.8
	26-33 Tahun	7	5.9
	34-41 Tahun	31	26.3
	42-49 Tahun	32	27.1
	≥ 50 Tahun	47	39.8
	Total	118	100.0

Sumber: Data primer diolah, 2025

Hasil distribusi usia responden menunjukkan bahwa mayoritas berada pada rentang usia ≥ 50 tahun berjumlah 47 orang (39,8%), diikuti oleh usia 42–49 tahun berjumlah 32 orang (27,1%) dan usia 34–41 tahun berjumlah 31 orang (26,3%). Responden yang berusia 26–33 tahun tercatat berjumlah 7 orang (5,9%), sementara kelompok usia termuda 18–25 tahun berjumlah 1 orang (0,8%).

Pendidikan Terakhir Responden

Deskriptif responden berdasarkan pendidikan terakhir perangkat desa dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Deskriptif Pendidikan Terakhir Responden

		F	Persentase
Valid	SMA/SMK	78	66.1
	Diploma	7	5.9
	Sarjana	33	28.0
	Total	118	100.0

Sumber: Data primer diolah, 2025

Hasil distribusi pendidikan terakhir dari 118 perangkat desa di Kecamatan Karangawen dan Mranggen menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan SMA/SMK berjumlah 78 orang (66,1%), diikuti oleh lulusan sarjana berjumlah 33 orang (28%), dan diploma berjumlah 7 orang (5,9%).

Jabatan Responden

Deskriptif responden berdasarkan jabatan perangkat desa dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Deskriptif Jabatan Responden

		F	Persentase
Valid	Kepala Desa	30	25.4
	Sekretaris Desa	30	25.4
	Bendahara	29	24.6
	Staff Lainnya	29	24.6
	Total	118	100.0

Sumber: Data primer diolah, 2025

Hasil distribusi jabatan dari 118 perangkat desa di Kecamatan Karangawen dan Mranggen menunjukkan bahwa posisi terbanyak dipegang oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa, masing-masing berjumlah 30 orang (25,4%). Selanjutnya, terdapat 29 orang (24,6%) yang menjabat sebagai Bendahara dan 29 orang (24,6%) lainnya sebagai Staf Lainnya.

Uji Instrumen

Uji Validitas

Hasil pengujian validitas disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Uji Validitas

X1		X2		X3		X4		Y	
Item	r hitung								
X1.1	0.672	X2.1	0.831	X3.1	0.637	X4.1	0.753	Y.1	0.758
X1.2	0.660	X2.2	0.785	X3.2	0.644	X4.2	0.736	Y.2	0.754
X1.3	0.688	X2.3	0.767	X3.3	0.668	X4.3	0.706	Y.3	0.753
X1.4	0.780	X2.4	0.772	X3.4	0.620	X4.4	0.744	Y.4	0.737
X1.5	0.665	X2.5	0.795	X3.5	0.581	X4.5	0.670	Y.5	0.745
X1.6	0.658	X2.6	0.773	X3.6	0.634	X4.6	0.643	Y.6	0.749
X1.7	0.698	X2.7	0.758	X3.7	0.627	X4.7	0.642	Y.7	0.707
X1.8	0.700	X2.8	0.759	X3.8	0.613	X4.8	0.726	Y.8	0.605

Sumber: Data primer diolah, 2025

Hasil uji validitas menunjukkan seluruh butir pernyataan pada variabel Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur, *Whistleblowing System*, GCG, dan Pencegahan Kecurangan menunjukkan nilai r hitung > r tabel sebesar 0,1809. Temuan ini mengindikasikan bahwa seluruh item dalam instrumen penelitian dinyatakan valid dan layak.

Uji Reliabilitas

Hasil pengujian reabilitas instrumen disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha (> 0.7)	Kesimpulan
Pengendalian Internal	0.843	Handal
Kompetensi Aparatur	0.907	Handal
<i>Whistleblowing System</i>	0.780	Handal
<i>Good Corporate Governance</i>	0.854	Handal
Pengendalian <i>Fraud</i>	0.872	Handal

Sumber: Data primer diolah, 2025

Hasil uji reabilitas menunjukkan bahwa seluruh instrumen semua variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70. Dapat disimpulkan instrumen adalah reliabel atau handal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		118
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Dev	2.47835947
Most Extreme Differences	Absolute	0.076
	Positive	0.076
	Negative	-0.047
Test Statistic		0.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.095 ^{c,d}

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai signifikansi $0,095 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini mengikuti distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinearitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8. Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengendalian Internal	0.588	1.701
	Kompetensi Aparatur	0.577	1.732
	Whistleblowing System	0.880	1.136
	Good Corporate Governance	0.722	1.386

a. Dependent Variable: Pengendalian Fraud

Sumber: Data primer diolah, 2025

Hasil uji multikolinearitas diperoleh nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF $< 10,00$. Maka dapat disimpulkan model regresi **tidak terjadi gejala multikolinearitas**.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas disajikan pada table berikut:

Tabel 9. Uji Heteroskedastisitas

Model		t	Sig.
1	(Constant)	2.578	0.011
	Pengendalian Internal	-0.450	0.653
	Kompetensi Aparatur	-1.320	0.190
	Whistleblowing System	1.371	0.173
	Good Corporate Governance	-1.825	0.071

a. Dependent Variable: Abs Res

Sumber: Data primer diolah, 2025

Hasil uji glejser diperoleh nilai signifikansi variabel Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur, *Whistleblowing System* dan *Good Corporate Governance* terhadap nilai *absolute residual* lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan model regresi **tidak terjadi gejala heteroskedastisitas**.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda disajikan berikut:

Tabel 10. Koefisien Regresi

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	5.891	3.439	
	Pengendalian Internal	0.229	0.090	0.213
	Kompetensi Aparatur	0.382	0.076	0.421
	Whistleblowing System	-0.048	0.085	-0.038
	Good Corporate Governance	0.279	0.078	0.268

Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Sumber: Data primer diolah, 2025

Hasil analisis regresi liner berganda diperoleh persamaan regresi:

$$Y = 0,213 X_1 + 0,421 X_2 - 0,038 X_3 + 0,268 X_4 + e$$

Dimana:

1. Koefisien regresi sebesar 0,213 pada variabel pengendalian internal menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
2. Koefisien regresi sebesar 0,421 pada variabel kompetensi aparatur desa menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
3. Koefisien regresi sebesar -0,038 pada variabel whistleblowing system menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan.
4. Koefisien regresi sebesar 0,268 pada variabel GCG menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model digunakan sebagai alat ukur kesesuaian fungsi dari suatu model regresi dalam memprediksi secara statistik pada nilai aktual. Nilai f tabel diperoleh berdasarkan $df1 (N1) = k-1 = 4$ dan $df2 (N2) = n-k = 118-5$ adalah 113 sebesar 2,45. Hasil uji kelayakan model disajikan pada tabel berikut:

Tabel 11. Uji Kelayakan Model

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	843.906	4	210.976	33.174	<0.001 ^b
	Residual	718.645	113	6.360		
	Total	1562.551	117			
a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud						
b. Predictors: (Constant), <i>Good Corporate Governance</i> , Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Kompetensi Aparatur						

Sumber: Data primer diolah, 2025

Haail uji kelayakan model diperoleh nilai F hitung $33,174 > 2,45$ dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Maka model regresi yang digunakan layak (*fit*) secara statistik. Sehingga variasi Pencegahan Kecurangan mampu dijelaskan oleh Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur, *Whistleblowing System*, dan GCG dengan baik.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ditunjukkan melalui nilai *Adjusted R Square* (Ghozali, 2018). Hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 12. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.735 ^a	0.540	0.524	2.522
a. Predictors: (Constant), <i>Good Corporate Governance</i> , Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Kompetensi Aparatur				
b. Dependent Variable: Pencegahan Fraud				

Sumber: Data primer diolah, 2025

Nilai *Adjusted R Square* 0,524 atau 52,4%. Hal ini menunjukkan Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur, *Whistleblowing System*, dan GCG mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel Pencegahan Kecurangan sebesar 52,4% dan sisanya 47,6% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana variabel independen secara parsial dalam mempengaruhi variabel dependen. Nilai T_{tabel} diperoleh berdasarkan df (118-4=114) pada taraf kesalahan 5% sebesar 1,980. Hasil uji parsial disajikan pada table berikut:

Tabel 13. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.891	3.439		1.713	0.090
Pengendalian Internal	0.229	0.090	0.213	2.559	0.012
Kompetensi Aparatur	0.382	0.076	0.421	5.015	<0,001
Whistleblowing System	-0.048	0.085	-0.038	-0.558	0.578
GCG	0.279	0.078	0.268	3.562	<0,001

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Sumber: Data primer diolah, 2025

Hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan menjadi kesimpulan dibawah ini:

1. Variabel *Pengendalian Internal* (X1) menunjukkan nilai *t hitung* sebesar 2,559, yang melebihi *t tabel* sebesar 1,980. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,012 yang lebih kecil dari 0,05, serta koefisien regresi positif sebesar 0,213, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, *Pengendalian Internal* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap upaya *Pencegahan Kecurangan*.
2. Variabel *Kompetensi Aparatur* (X2) memperoleh nilai *t hitung* sebesar 5,015, lebih besar dari nilai *t tabel* 1,980, dan nilai signifikansi < 0,001, lebih kecil dari ambang batas 0,05. Koefisien regresi sebesar 0,421 mengindikasikan hubungan yang positif. Oleh karena itu, H_0 ditolak dan H_2 diterima, yang berarti bahwa *Kompetensi Aparatur* secara signifikan dan positif memengaruhi *Pencegahan Kecurangan*.
3. Variabel *Whistleblowing System* (X3), diperoleh nilai *t hitung* -0,558 yang berada di bawah nilai *t tabel* 1,980, serta nilai signifikansi sebesar 0,578 yang melebihi batas 0,05. Koefisien regresi negatif sebesar -0,038 menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_3 ditolak. Dengan demikian, *Whistleblowing System* tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap *Pencegahan Kecurangan*.
4. Variabel *Good Corporate Governance* (X4) menghasilkan nilai *t hitung* 3,562 yang lebih tinggi dari *t tabel* 1,980, dan nilai signifikansi < 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Koefisien regresi positif sebesar 0,268 mendukung keputusan untuk menolak H_0 dan menerima H_4 . Ini menandakan bahwa *Good Corporate Governance* memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap *Pencegahan Kecurangan*.

Pembahasan

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan

Hasil uji t pada variabel Pengendalian Internal (X1) menunjukkan nilai *t hitung* sebesar 2,559, lebih besar dari *t tabel* 1,980, dengan nilai signifikansi 0,012 < 0,05 dan koefisien regresi positif 0,213. Hal ini mengindikasikan pengaruh positif signifikan, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Semakin efektif penerapan sistem pengendalian internal oleh perangkat desa, semakin optimal langkah pencegahan terhadap kecurangan. Temuan ini sejalan dengan *Stewardship Theory* yang menyatakan perangkat desa sebagai *steward* yang bertanggung jawab mengelola sumber daya secara akuntabel dan mencegah penyalahgunaan dana.

Tanggapan responden di Kecamatan Mranggen dan Karangawen menunjukkan bahwa pengendalian internal berjalan dengan baik, terutama dalam kepatuhan terhadap prosedur dan pelaksanaan dana desa sesuai standar operasional. Lingkungan kerja yang tertata mendukung upaya pencegahan kecurangan, namun aspek pemantauan masih perlu ditingkatkan.

Koordinasi dan evaluasi oleh pimpinan belum optimal, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dapat diperkuat (Saparani et al., 2023). Pengendalian internal yang efektif menciptakan lingkungan transparan dan akuntabel, meminimalisasi risiko kecurangan yang tinggi dalam pengelolaan dana publik desa (Kaswoto et al., 2025).

Penelitian ini didukung oleh temuan Adhivinna et al., (Adhivinna et al., 2022) yang menunjukkan pentingnya pengendalian internal dalam mencegah kecurangan, serta Saida et al., (Saida et al., 2023) yang menegaskan bahwa sistem pengendalian internal yang baik mampu mengurangi risiko kecurangan keuangan. Dengan demikian, penerapan pengendalian internal yang efektif menjadi faktor kunci dalam pencegahan kecurangan, khususnya dalam pengelolaan dana desa, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan dana digunakan tepat sasaran (Maujud et al., 2024).

Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan hasil uji t, variabel Kompetensi Aparatur (X2) menunjukkan nilai t hitung sebesar 5,015, melebihi t tabel 1,980, dengan signifikansi $< 0,001$ dan koefisien regresi positif 0,421. Hal ini mengindikasikan pengaruh positif signifikan sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima. Semakin tinggi kompetensi aparatur desa, semakin besar kontribusinya dalam mencegah kecurangan pengelolaan dana desa. Temuan ini sejalan dengan *Stewardship Theory* yang menempatkan aparatur sebagai *steward* yang bertanggung jawab profesional mengelola sumber daya demi mencegah kecurangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tanggapan responden menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa secara umum sangat baik, terutama dalam kemampuan menjalin kerja sama antar perangkat desa. Meski kemampuan mencari solusi dinilai tinggi, masih diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa untuk memperkuat sinergi dan transparansi, yang mendukung pencegahan kecurangan (Aca et al., 2024). Kompetensi yang baik juga mempermudah aparatur melakukan evaluasi dan pengawasan program dana desa, sehingga mengurangi risiko penyimpangan dan mempercepat penanganan masalah (Nur & Urumsah, 2025). Meskipun terdapat ruang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, kompetensi yang tinggi tetap memberikan kontribusi besar dalam membangun tata kelola yang lebih baik dan mencegah tindak kecurangan.

Penelitian ini didukung oleh temuan Suandewi (Suandewi, 2021) dan Dewi et al., (Dewi et al., 2022) yang menyatakan bahwa kompetensi staf berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan, dimana staf yang kompeten mampu mengenali dan mengantisipasi potensi kecurangan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur desa menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan bebas dari kecurangan.

Pengaruh Whistleblowing System terhadap Pencegahan Kecurangan

Hasil uji t terhadap variabel Whistleblowing System (X3) menunjukkan nilai t hitung -0,558 yang lebih kecil dari t tabel 1,980, dengan signifikansi $0,578 > 0,05$ dan koefisien regresi negatif -0,038. Ini mengindikasikan pengaruh yang negatif dan tidak signifikan secara statistik, sehingga H_0 diterima dan H_3 ditolak. Artinya, sistem whistleblowing belum berkontribusi signifikan dalam mencegah kecurangan di tingkat desa, kemungkinan akibat rendahnya partisipasi pelaporan dan efektivitas implementasi yang kurang optimal.

Meskipun tanggapan responden memberikan persepsi yang sangat positif terhadap *Whistleblowing System* dengan rata-rata nilai 4,43 (kategori sangat tinggi), hasil empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi dan realita implementasi. Faktor utama yang menyebabkan hal ini antara lain adalah rendahnya tingkat pelaporan aktual, partisipasi yang belum optimal, serta sistem yang belum berjalan secara efektif di lapangan. Hal tersebut mencerminkan bahwa meskipun aparatur desa memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya mekanisme pelaporan pelanggaran, implementasi dan dukungan terhadap sistem

whistleblowing masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal perlindungan pelapor dan tindak lanjut atas laporan yang masuk (Putri et al., 2023).

Penelitian ini didukung oleh temuan Dewi et al., (Dewi et al., 2022) dan (2022) yang juga menyatakan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah adanya pengawasan ketat dari pemerintah terhadap penggunaan dana desa sehingga *whistleblowing* dianggap tidak memberikan kontribusi yang nyata. Oleh karena itu, tanpa adanya peningkatan efektivitas sistem, perlindungan bagi pelapor, dan mekanisme tindak lanjut yang jelas, peran *whistleblowing system* dalam mencegah kecurangan di tingkat desa akan sulit untuk dioptimalkan.

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan Kecurangan

. Hasil uji t terhadap variabel *Good Corporate Governance* (X4) menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,562 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,980, dengan nilai signifikansi < 0,001 dan koefisien regresi positif sebesar 0,268. Hasil ini menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif secara signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan, sehingga H_0 ditolak dan H_4 diterima. Temuan ini selaras dengan *Stewardship Theory*, yang menekankan bahwa aparatur desa sebagai *steward* bertanggung jawab mengelola sumber daya publik dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik terutama transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam mencegah penyimpangan serta membangun kepercayaan publik.

Dari tanggapan responden di Kecamatan Mranggen dan Karangawen, diketahui bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG dinilai sudah berjalan optimal, khususnya pada aspek akuntabilitas, yang mencerminkan adanya sistem pelaporan yang jelas dan bertanggung jawab. Namun, pada aspek transparansi, meskipun sudah tersedia informasi yang cukup, responden menilai bahwa keterbukaan informasi masih dapat ditingkatkan dalam hal aksesibilitas dan kemudahan pemahaman. Artinya, meskipun GCG telah berjalan dengan cukup baik, peningkatan kualitas transparansi masih menjadi pekerjaan rumah agar pengelolaan dana desa semakin terbuka dan akuntabel (Harahap & Ritonga, 2024).

Sistem pelaporan yang terbuka dan akuntabel memungkinkan kegiatan pengelolaan dana desa untuk lebih mudah diawasi oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan lain. Hal ini secara langsung menekan potensi kecurangan karena adanya pengawasan publik. Penelitian ini diperkuat oleh temuan Naufal (Naufal, 2023) dan Destiyana *et al.*, (Destiyana et al., 2024) yang menegaskan bahwa penerapan GCG secara efektif, melalui transparansi, akuntabilitas, dan integritas, dapat memperkuat sistem keuangan desa dan mencegah terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, implementasi GCG yang lebih menyeluruh menjadi kunci penting dalam memperkuat tata kelola keuangan desa yang bersih dan berintegritas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut, kesimpulan atas pengaruh masing-masing variabel pada pencegahan kecurangan dana desa di Kecamatan Mranggen dan Karangawen adalah:

1. Pengendalian internal berpengaruh positif signifikan pada pencegahan kecurangan, yang menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian yang kuat mampu meminimalkan potensi terjadinya kecurangan pengelolaan dana desa.
2. Kompetensi aparatur desa juga terbukti berpengaruh positif signifikan pada pencegahan kecurangan, artinya semakin tinggi kemampuan dan keahlian aparatur, semakin efektif pula mereka dalam menghindari dan mengatasi tindakan kecurangan.
3. *Whistleblowing system* tidak berpengaruh signifikan pada pencegahan kecurangan, yang mengindikasikan bahwa sistem pelaporan yang ada belum berjalan secara optimal atau belum dimanfaatkan secara maksimal di tingkat desa.

4. *Good Corporate Governance* memberikan pengaruh positif signifikan pada pencegahan kecurangan, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti akuntabilitas dan transparansi dapat memperkuat integritas pengelolaan dana desa.
5. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi, variabel *Pengendalian Internal*, *Kompetensi Aparatur*, *Whistleblowing System*, dan *Good Corporate Governance* bersama-sama mampu menjelaskan variabilitas dalam *Pencegahan Kecurangan* sebesar 52,4%. Sedangkan sebesar 47,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain meskipun variabel yang diteliti mampu menjelaskan 52,4% pengaruh terhadap pencegahan kecurangan, masih ada 47,6% pengaruh dari faktor lain yang tidak diteliti. Selain itu, meskipun *whistleblowing system* tidak mempengaruhi pencegahan kecurangan, penelitian ini belum dapat mengungkap secara mendalam penyebab lemahnya efektivitas sistem tersebut di tingkat desa.

Saran

Dari hasil analisis, berikut adalah rekomendasi yang peneliti ajukan:

1. Bagi Pemerintah Desa
 - a. Pemerintah desa perlu terus memperkuat sistem pengendalian internal, terutama dalam aspek pengawasan dan prosedur kerja yang sistematis, guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana.
 - b. Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan pelatihan dan pengembangan aparatur desa secara berkala agar kompetensi mereka tetap relevan dan mampu menjawab tantangan dalam tata kelola keuangan desa secara profesional.
 - c. Disarankan agar pemerintah memperbaiki mekanisme implementasi sistem *whistleblowing*, termasuk dalam hal sosialisasi, jaminan kerahasiaan pelapor, dan tindak lanjut laporan agar sistem ini benar-benar menjadi sarana efektif dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan.
 - d. Penerapan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi dan akuntabilitas perlu terus ditingkatkan melalui digitalisasi pelaporan, keterbukaan informasi publik, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan.

2. Bagi Penelitian Mendatang

Peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah penelitian ke daerah lain dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan tata kelola yang berbeda, guna memperoleh hasil yang lebih generalis dan komparatif. Selain itu, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan dalam menganalisis pencegahan kecurangan, seperti integritas individu, budaya organisasi, sistem *reward and punishment*, serta pengawasan partisipatif dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aca, A., Haeran, H., Munip, A., & Kurniawan, K. (2024). Peningkatan Sinergisitas Antara Pemerintah Desa dengan BPD Pematang Rahim dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Efektif. *Jurnal Bangun Abdimas*, 3(2), 272–277.
- Adhivinna, V. V., Selawati, M., & Umam, M. S. (2022). Kompetensi Aparatur Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(2), 63–74. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i2.138>
- Akhyaar, K., Purwantini, A. H., Afif, N., & Prasetya, W. A. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202–217. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217>

- Destiyana, A., Yassarah, Fitri S., & Machdar, N. M. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance, Pengendalian Internal, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 27–39. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i3.2528>
- Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 327–340. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870>
- Fathoni, A. H., Salsabilah, J., & Machdar, N. M. (2024). Pengaruh Whistleblowing System dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 99–110. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i2.1815>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, T., & Ritonga, R. A. (2024). Peran Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 2(2), 353–360.
- Kaswoto, J., Budiman, M., Mubarak, A. Z., Sugihyanto, T., Wahyono, Z., & Sudarmanto, E. (2025). Tafsir Ekonomi: Pencegahan Kecurangan dengan Pendekatan Teori Fraud Triangle dalam Perspektif Tafsir Jalalain. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(01).
- Kompas.com. (2023). Kades di Demak Korupsi Dana Desa Rp 220 Juta, Ternyata Pernah Ditahan Kasus Judi Kartu. *Kompas.Com*.
- Kompas.com. (2024). ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi. *Kompas.Com*.
- Kusumaningrum, R., & Wulandari, I. (2023). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal, dan moralitas individu terhadap pencegahan fraud dana desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 2023.
- Maujud, A. H., Zamzam, I., & Meliana. (2024). Fenomena Potensi Kecurangan (Fraud) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDdes) Mateketen Kecamatan Makian Barat. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 4(1), 23–37.
- Mufidah, M., & Masnun, M. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 519. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.408>
- Naufal, A. (2023). Pengaruh Presepsi karyawan Mengenai good Corporate Governance, Budaya Organisasi dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud (Studi pada PT. X). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1.
- Nur, M., & Urumsah, D. (2025). Determinan Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa di Sulawesi Selatan. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 74–82.
- Putri, F. D. W., Azarah, A. Y., & Agustina, R. D. (2023). Peran Perangkat Desa dalam Menjaga Stabilitas Sosial dan Memberikan Pelayanan Publik di Desa Jubung. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(4), 230–247.
- Raharja, D. P., & Sulistyowati, E. (2024). Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis

Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6, 3384–3398. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5283>

- Rahmadani, S., & Sugiarto. (2023). *Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa*.
- Saida, S., Diah Fakhriyyah, D., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Malang, U. (2023). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa di Kecamatan Pandaan). *E_ Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12, 614–624.
- Saparani, A. S., Rukmana, L. M., Maryamah, S., Wulandari, & Triantoro, A. (2023). Analisis Pengendalian Internal pada Desa Nagrak Kec. Cangkuang Kab. Bandung Tahun 2022. *Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 2(1), 1–8.
- Suandewi, N. K. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Payangan). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tama, I. F., Wijaya, A. L., & Nurhayati, P. (2022). Pengaruh Whistleblowing System, Peran Pengendalian Internal, Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pada Rumah Sakit Rujukan Pasien Covid-19 Kota Madiun. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 4, 4(1), 1–21.